

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia saat ini sedang terus melakukan berbagai pembangunan dan membenahan situasi keadaan perekonomian saat ini hingga kedepannya. Melalui pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan atau yang disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pelaksanaan SDGs pada tahun 2015 menjadi suatu capaian terbesar dalam sejarah dunia, terdapat 17 target capaian dan 169 sasaran. Dinyatakan *no poverty* (tanpa kemiskinan) sebagai poin prioritas, agenda komprehensif global untuk mengentas kemiskinan dalam bentuk apapun dan sangat terkait dengan tujuan global lainnya diantaranya dunia tanpa kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan yang baik, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan *gender*, air bersih dan sanitasi memadai, dan energi bersih dan ramah lingkungan serta terjangkau. Sebanyak 193 kepala negara dan salahsatunya Pemerintah Indonesia ikut menyetujui agenda pembangunan global ini, dan dasar landasan hukum disiapkan untuk dijadikan sebagai bukti komitmen politik.

SDGs mengakomodasi permasalahan pembangunan baik secara kualitatif dan kuantitatif serta secara komprehensif dan mengedepankan nilai yang inklusif dan proses yang partisipatif serta bersifat universal, seimbang, dan menyeluruh bagi negara-negara baik negara maju, berkembang, dan tertinggal. Ada 5 (lima)

prinsip “P” diantaranya *people* (manusia), *planet* (bumi), *prosperity* (kemakmuran), *peace* (perdamaian), dan *partnership* (kerjasama) dalam pembangunan yang tidak dapat terpisahkan atau saling terhubung dan terintegrasi satu sama lain untuk mencapai kehidupan dan tatanan yang lebih baik. Hal tersebut menjadi strategi Indonesia dan banyak negara lainnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan penduduknya.

Upaya pengentasan kemiskinan terintegratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah ada pada masa MDGs dan berlanjut pada era SDGs, upaya tersebut dilakukan oleh Pemerintah Indonesia salahsatunya melalui Instruksi Presiden (Inpres) Desa Tertinggal pada tahun 1995. Kemudian Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai langsung oleh Wakil Presiden.

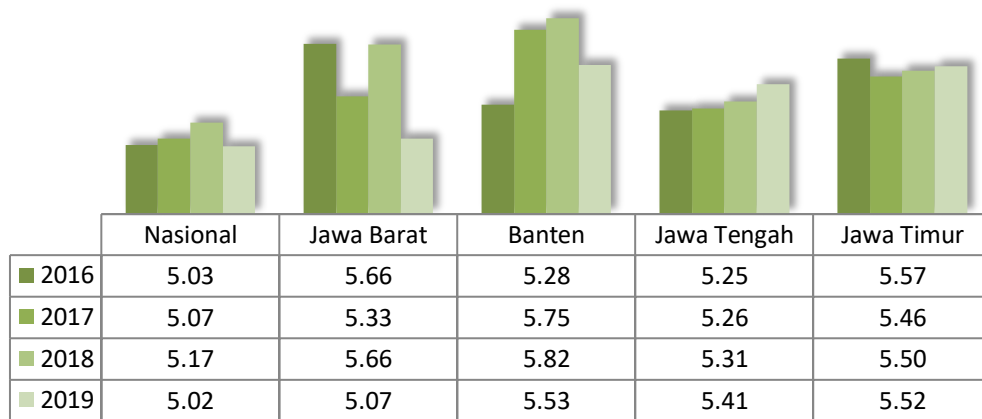
Kemiskinan masih menjadi masalah serius, salah satu usaha Pemerintah Indonesia dalam melakukan pemerataan menyeluruh diwujudkan melalui Dana Desa yang dialokasikan khusus dalam Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN), dan dana tersebut untuk membiayai pelaksanaan dan kegiatan lokal desa. Dana yang pertama kali digulirkan pada tahun 2015 diharapkan mampu mengentas ketimpangan kesejahteraan di wilayah kota dan desa. Penganggaran ini disalurkan langsung oleh pemerintah kepada desa agar desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan anggaran dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Oleh karena itu rencana penggunaan anggaran wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa.

Pemberdayaan masyarakat desa berupaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan kesadaran, keterampilan, dan pemanfaatan sumberdaya yang ada melalui program dan kebijakan, serta pendampingan. Dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan dapat menciptakan kemandirian desa melalui meningkatkan kapasitas masyarakat/komunitas dan lembaga masyarakat, lapang usaha produktif, pengembangan teknologi tepat guna, dan pelatihan warga desa. Agar pemberdayaan tepat guna dapat dilakukan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat agar terus berkembang atau *enabling*, kemudian memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat atau *empowering*, dan memperkuat serta melindungi kemandirian.

Salah satu indikator perkembangan ekonomi di suatu daerah adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 5,66% dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17%. Meskipun begitu, jika dilihat pada Gambar 1.1. pertumbuhan ekonomi Jawa Barat lebih kecil dibandingkan dengan 3 provinsi lainnya. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, contohnya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,59%.

### Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan 4 Provinsi di Pulau Jawa (persen per tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

**Gambar 1.1.** Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan 4 Provinsi di Pulau Jawa  
(% per tahun)

Program-program SDGs diharapkan dapat mengurangi masalah-masalah pembangunan lebih menyeluruh baik secara kualitatif dan kuantitatif serta mengatasi permasalahan rakyat “*No One Left Behind*”. Melalui tujuan SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ke-3 adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Target-target capaian dari tujuan tersebut diantaranya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, pencegahan penyalahgunaan zat, menjamin akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, meningkatkan cakupan kesehatan universal, peningkatan pembiayaan kesehatan, dan lainnya.

Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam pencapaian indikator-indikator SDGs tersebut maka digulirkannya Dana Desa. Beberapa hasil

pembangunan pada akhir tahun 2016 yang diantaranya didanai dengan dana desa ini adalah :

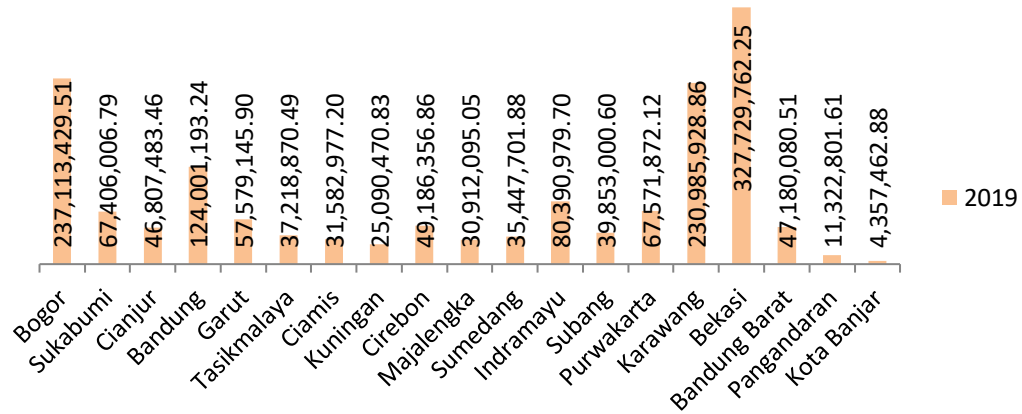
**Tabel 1.1. Fasilitas Sarana dan Prasarana yang Terbangun dari Dana Desa  
Tahun 2016**

|                           |                         |                              |                               |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 66.884 km<br>Jalan Desa   | 511,9 km<br>Jembatan    | 1.819 Unit<br>Pasar Desa     | 14.034 Unit<br>Sumur          |
| 686 Unit<br>Embung        | 65.998 Unit<br>Drainase | 12.596 Unit<br>Irigasi       | 11.296 Unit<br>PAUD           |
| 3.133 Unit<br>Polindes    | 7.524 Unit<br>Posyandu  | 38.184 Unit<br>Penahan Tanah | 1.373 Unit<br>Tambatan Perahu |
| 16.295 Unit<br>Air Bersih |                         | 37.368 Unit<br>MCK           |                               |

Sumber: Kementerian Keuangan

Kondisi kesejahteraan masyarakat di setiap Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat berbeda antara satu sama lain. Dilihat dari indikator PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, Kabupaten Bekasi berada di tingkat pertama dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku nya yang tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Begitu pula jika kita lihat pada Gambar 1.3. dibawah nanti, persentase penduduk miskin Kabupaten Bekasi pun rendah, bahkan pada tahun 2019 saja persentase penduduk miskinnya hanya mencapai 4,01%. Kemudian disusul dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor yang PDRB Atas Dasar Harga Berlaku nya tertinggi, seperti terlihat pada Gambar 1.2.

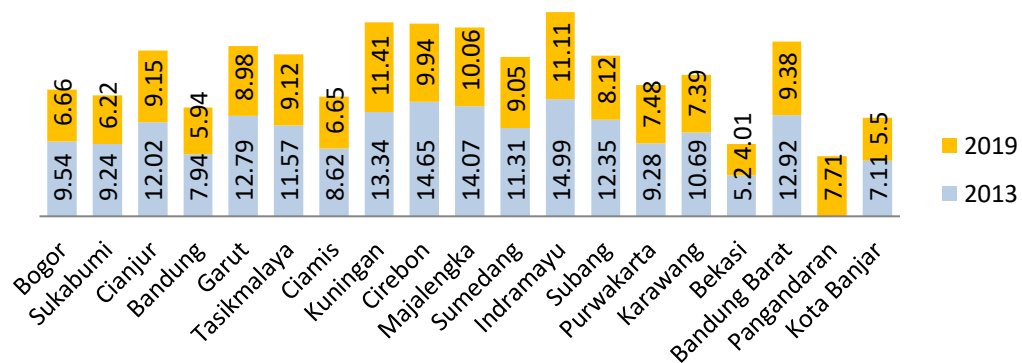
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di  
19 Kabupaten/Kota (Milyar Rupiah)**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, diolah

**Gambar 1.2.** PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

**Persentase Penduduk Miskin 19 Kabupaten/Kota Provinsi  
Jawa Barat  
(persen)**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, diolah

**Gambar 1.3.** Persentase Penduduk Miskin di 19 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat (persen) Tahun 2013 dan 2019

Selanjutnya persentase penduduk miskin melihat daerah dengan persentase penduduknya yang miskin dari sejumlah penduduknya yang ada di masing-masing daerah. Kabupaten Cirebon menjadi daerah yang mampu menekan kemiskinan sehingga persentase penduduk miskinnya menurun hingga 4,71%.

**Tabel 1.2. Persentase Penduduk yang Menggunakan Fasilitas Air Bersih**

| Kab/Kota     | Tahun |       | Kab/Kota                  | Tahun       |             |
|--------------|-------|-------|---------------------------|-------------|-------------|
|              | 2013  | 2018  |                           | 2013        | 2018        |
| Bogor        | 11.31 | 9.99  | Sumedang                  | 7,95        | 9,92        |
| Sukabumi     | 4.06  | 6.75  | Indramayu                 | 16,79       | 23,08       |
| Cianjur      | 5.29  | 7.46  | Subang                    | 7,71        | 9,79        |
| *Bandung     | 17.17 | 18.3  | Purwakarta                | 8,86        | 11,02       |
| Garut        | 6.45  | 7.73  | Karawang                  | 9,62        | 12,16       |
| *Tasikmalaya | 7.59  | 8.9   | Bekasi                    | -           | -           |
| Ciamis       | 6.18  | 8.32  | Bandung Barat             | -           | -           |
| Kuningan     | 12.23 | 17.61 | Pangandaran               | -           | -           |
| Cirebon      | 5.59  | 6.24  | Kota Banjar               | 20,39       | 19,88       |
| Majalengka   | 5.27  | 6.84  | <b>Rata-rata Kab/Kota</b> | <b>9,53</b> | <b>11,5</b> |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Pengolahan Data Survei Air Bersih Kab/Kota Provinsi Jawa Barat, diolah

Indikator kesejahteraan lainnya adalah bagaimana masyarakat dapat mengkonsumsi air bersih untuk kegunaan sehari-hari. Data pada Tabel 1.2. memperlihatkan persentase penduduk yang menggunakan fasilitas air bersih. Data tersebut merupakan akumulasi dari jumlah rumahtangga dan penduduk yang menggunakan fasilitas air bersih di 19 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Kuningan menjadi daerah dengan persentase tertinggi yang penduduknya menggunakan fasilitas air bersih dan mengalami peningkatan yang signifikan. Beberapa daerah lainnya menunjukkan peningkatan yang tidak begitu besar. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa

kebijakan berbeda yang diambil oleh setiap masing-masing kepala daerah. Ada yang merasa kecukupan akan air bersih di daerahnya sudah mencukupi, ataupun dana pembangunan diprioritaskan untuk pembangunan yang lain yang perlu ditingkatkan di setiap daerahnya.

**Tabel 1.3. Prioritas Penggunaan Dana Desa 2015-2019**

|                 |            |            |           |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| Jalan Desa      | Jembatan   | Pasar Desa | BUMDes    |
| Tambatan Perahu | Embung     | Irigasi    | Raga Desa |
| Penahan Tanah   | Air Bersih | MCK        | Polindex  |
| Drainase        | PAUD       | Posyandu   | Sumur     |

Sumber: Kementerian Desa, PDTT

Dana desa diprioritasnya untuk capaian “Menunjang Aktivitas Ekonomi Masyarakat” dan “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa”, dengan prioritas penggunaan Dana Desa seperti pada Tabel 1.3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara : Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan yang dimaksud adalah 30% jumlah penduduk kabupaten/kota, 20% luas wilayah kabupaten/kota, dan 50% angka kemiskinan kabupaten/kota. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi : (a) ketersediaan pelayanan dasar,



(b) kondisi infrastruktur, (c) transportasi, dan (d) komunikasi Desa ke kabupaten/kota.

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Menteri yang menangani Desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri, dan menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian. Kemudian menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian membuat pedoman umum kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa. Pedoman ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya prioritas penggunaan Dana Desa. Bupati/walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai dengan pedoman umum kegiatan.

Desa-desanya di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan Dana Desa telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengenai Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun yang bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi terdapat data status Desa, sehingga dilakukan rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota.

Pada 2016, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Ahmad Erani Yustika saat melakukan sosialisasi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, di Gedung Sate Bandung, menyampaikan bahwa Dana Desa dari pemerintah untuk 5.312 Desa yang ada di Jawa Barat per tanggal 8 Desember 2016 telah terserap 90%. Bahkan seluruh Desa yang ada di Kabupaten Kuningan, Cirebon, Pangandaran, dan Bandung Barat telah terserap 100%. Wakil Gubernur Jabar pada saat itu, Deddy Mizwar mengungkapkan, alokasi dana Desa di 5.312 Desa se-Jabar saat itu telah mencapai Rp 3,56 Triliun. Dengan realisasi diantaranya untuk pembangunan fisik sebesar 93%, pemberdayaan masyarakat 5,54%, penyelenggaraan pemerintah Desa 0,3% dan pembinaan kemasyarakatan 0,23%. Selain mempercepat laju pembangunan dan pemberdayaan desa, Jabar juga memadukan pengembangan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa, menumbuhkembangkan semangat entrepreneur, pemanfaatan teknologi informasi serta mengangkat nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk terwujudnya masyarakat desa yang mandiri, tangguh, bermartabat dan sejahtera.

Dengan begitu, diharapkan dengan adanya Dana Desa dapat terus meningkatkan dan menjaga kesejahteraan masyarakat desa di setiap daerahnya. Otonomi yang ditempuh setiap daerah harus mengutamakan kepentingan rakyat,

serta meningkatkan kapasitas dan potensi masyarakat. Oleh karena itu perlu dianalisis apakah dana desa yang telah digulirkan oleh pemerintah ini sudah berdampak pada perbaikan indikator-indikator kesejahteraan di wilayah-wilayah yang diprioritaskan mendapat dana desa, maka diperlukan kajian empiris yang dapat membuktikan dampak tersebut.

Oleh karena itu, dari beberapa penjelasan dan uraian diatas, maka peneliti mengambil penelitian dengan judul **“Dampak Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Peningkatan Perekonomian di 19 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019”**, untuk itu perlu dilakukan analisis secara empiris apakah Dana Desa telah berdampak positif atau berdampak pada kondisi kesejahteraan, kondisi ekonomi, bahkan kondisi kesehatan masyarakat di 19 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah:

1. Dari 17 target capaian SDGs, ada beberapa target yang digunakan sebagai indikator pada penelitian ini diantaranya ; tanpa kemiskinan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, air bersih dan sanitasi, dan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana perkembangan kondisi kesejahteraan masyarakat dari aspek ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur fasilitas sosial dan umum (fasos dan fasum), aspek kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, tingkat kemiskinan, dan pendapatan per kapita

(PDRB per kapita) di 19 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2019?

2. Bagaimana dampak Dana Desa terhadap aspek ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur fasilitas sosial dan umum (fasos dan fasum), aspek kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, tingkat kemiskinan, dan pendapatan per kapita (PDRB per kapita) di 19 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2019?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan kondisi kesejahteraan masyarakat dari aspek ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur fasilitas sosial dan umum (fasos dan fasum), aspek kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, tingkat kemiskinan, dan pendapatan per kapita (PDRB per kapita) di 19 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2019.
2. Untuk mengetahui dampak Dana Desa terhadap aspek ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur fasilitas sosial dan umum (fasos dan fasum), aspek kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, tingkat kemiskinan, dan pendapatan per kapita (PDRB per kapita) di 19 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2019.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan adalah:

1. Sebagai bahan informasi kepada peneliti dalam rangka melihat dampak Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian daerah,
2. Sebagai bahan informasi kepada Instansi-instansi terkait Dana Desa, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan perekonomian daerah terkait dengan tujuan peneliti,
3. Digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan Dana Desa, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan perekonomian daerah.